

# TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH: STUDI KUALITATIF TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DI SULAWESI TENGGARA

Zainab Masitha<sup>1</sup>, Dwi Zulfikar Mulyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam, Indonesia

\* Corresponding author: [zmasitha3@gmail.com](mailto:zmasitha3@gmail.com)

## ABSTRAK

Transparansi keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih menjadi masalah yang signifikan. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan pengetahuan dengan fokus pada transparansi keuangan daerah di wilayah ini, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan normatif empiris, yang melibatkan review jurnal, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi bervariasi signifikan antar kabupaten/kota, dengan kendala utama termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Persepsi masyarakat terhadap transparansi keuangan masih rendah, yang berdampak negatif pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, ditemukan bahwa daerah dengan transparansi yang lebih tinggi menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi teori dan praktik di bidang akuntansi publik, dengan menyarankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Kepercayaan Publik; Pengelolaan Keuangan; Transparansi; Tata Kelola Pemerintahan.

Copyright © 2024 by the author



## PENDAHULUAN

Transparansi keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi ini melibatkan penyajian informasi keuangan yang jujur, lengkap, dan dapat diakses oleh publik. Di banyak negara,

termasuk Indonesia, transparansi keuangan daerah menjadi perhatian utama karena terkait dengan upaya pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, seperti di daerah lain, dituntut untuk mengelola anggaran secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan. Masalah spesifik yang ditangani dalam penelitian ini adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun sudah ada regulasi dan kebijakan yang mendorong transparansi, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya kendala dalam implementasinya. Masalah ini penting karena transparansi yang rendah dapat mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan publik, serta potensi penyalahgunaan anggaran yang berdampak negatif pada pembangunan daerah (Dianitha et al., 2020). Kurangnya transparansi juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks akuntansi publik, transparansi keuangan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan transparansi keuangan. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Adila et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari sudut pandang teoritis tetapi juga memberikan implikasi praktis yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan dan praktisi di bidang akuntansi publik. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dengan fokus pada transparansi keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebuah konteks yang belum banyak diteliti dalam literatur sebelumnya. Penelitian terdahulu telah membahas pentingnya transparansi dan kendala yang dihadapi, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana penerapan transparansi di wilayah tertentu dapat mempengaruhi kepercayaan publik secara mendalam (Hasibuan et al., 2023). Metode penelitian kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik transparansi dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kontribusi penelitian ini terletak pada fokus regional yang spesifik dan penggunaan metode kualitatif yang memberikan wawasan lebih mendalam, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif (Abdussamad, 2022).

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan transparansi keuangan serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, penelitian ini ingin membuktikan bahwa peningkatan transparansi dapat memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan

mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas keuangan di Sulawesi Tenggara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Penelitian tentang transparansi keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh berbagai akademisi dan praktisi. Misalnya, Suhartini dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah" pada tahun 2017, menemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Suhartini mengungkapkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip transparansi dengan baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan untuk memastikan akuntabilitas.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Prasetyo pada tahun 2018 berjudul "Implementasi Transparansi Keuangan dalam Pengelolaan Anggaran Daerah" menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan transparansi adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun regulasi sudah mendukung, pelaksana di lapangan sering kali tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan. Handayani dan Prasetyo menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian terbaru oleh Wicaksono pada tahun 2020 dengan judul "Transparansi Keuangan dan Kepercayaan Publik: Studi Kasus di Indonesia" menyoroti hubungan antara transparansi keuangan dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik. Wicaksono menemukan bahwa ketika masyarakat dapat mengakses informasi keuangan yang jelas dan tepat waktu, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa transparansi keuangan tidak hanya penting untuk akuntabilitas, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengeksplorasi dan memahami tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris, yang menggabungkan analisis normatif berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ada dengan temuan empiris dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi sejauh mana transparansi diterapkan, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku (Abdussamad, 2022). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui review jurnal yang relevan, dokumentasi dari pemerintah daerah, serta studi kepustakaan yang mendalam. Data sekunder dikumpulkan

dari berbagai sumber termasuk laporan resmi pemerintah, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik transparansi keuangan daerah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan mendukung tujuan penelitian. Lokasi penelitian dipilih di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa daerah tersebut memiliki dinamika pengelolaan keuangan daerah yang kompleks dan beragam, sehingga memberikan konteks yang kaya untuk penelitian tentang transparansi keuangan. Selain itu, Sulawesi Tenggara juga merupakan daerah yang sedang berkembang, sehingga temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah di wilayah tersebut dan mungkin juga dapat diterapkan di daerah lain dengan karakteristik serupa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan transparansi keuangan daerah. Proses analisis melibatkan beberapa tahap, termasuk pengkodean data, kategorisasi, dan pengembangan tema utama. Data dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif untuk memastikan akurasi dan validitas temuan. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan dalam konteks teori dan literatur yang ada untuk memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang transparansi keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan deskriptif analitis dengan metode induktif memungkinkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai penerapan transparansi keuangan di daerah penelitian. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur akademis dengan menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk studi lebih lanjut dalam bidang akuntansi public.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

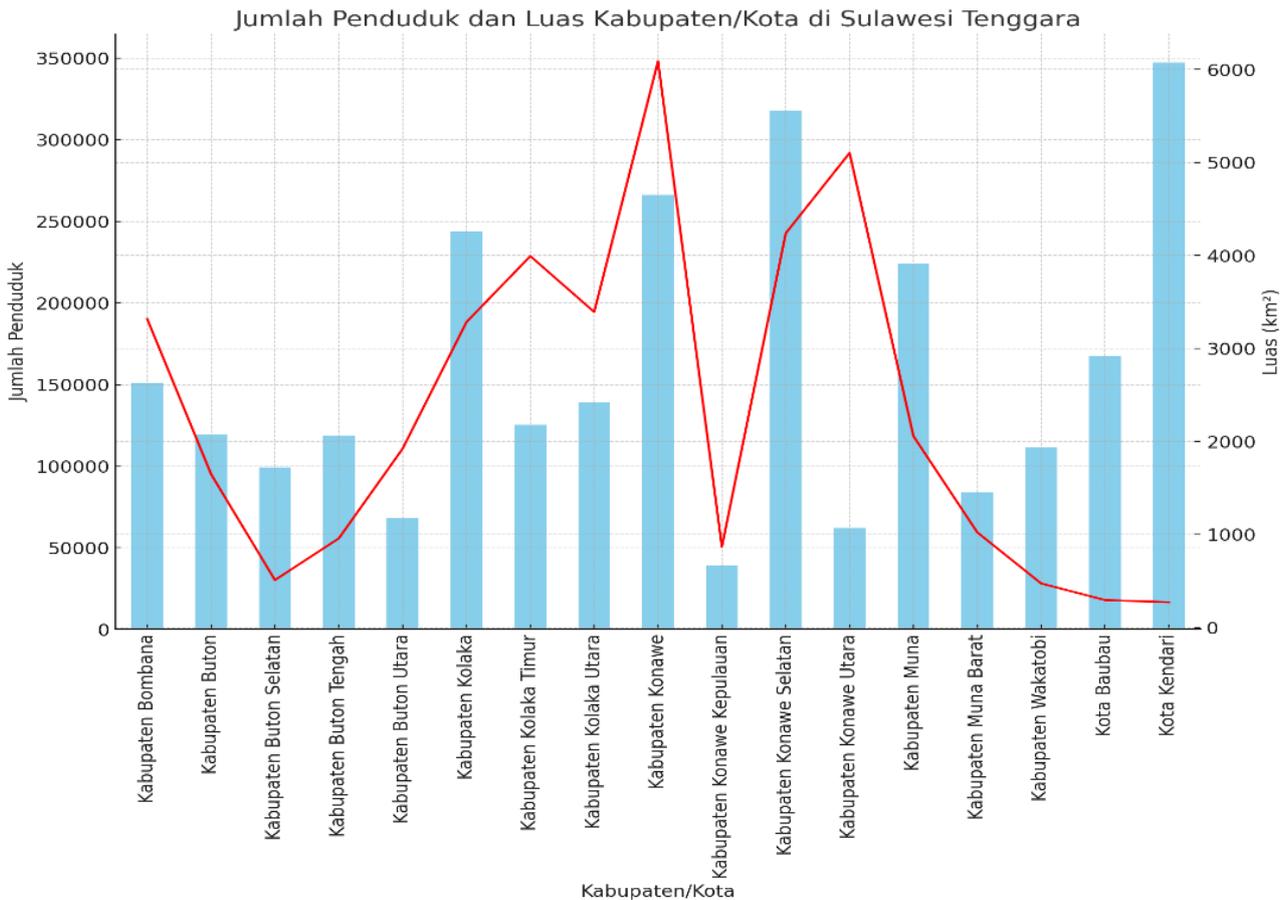
### **Penerapan Konsep Transparansi Keuangan Daerah**

Tingkat transparansi keuangan daerah di Sulawesi Tenggara masih bervariasi antara kabupaten/kota, dengan beberapa daerah menunjukkan tingkat transparansi yang cukup baik sementara yang lain masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Persepsi masyarakat terhadap transparansi keuangan juga bervariasi, dengan sebagian besar responden menyatakan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya transparan dan mudah diakses. Dampak dari transparansi yang rendah ini terlihat pada tingkat kepercayaan publik yang masih rendah terhadap pemerintah daerah, yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung. Implementasi kebijakan transparansi yang lebih

tegas dan komprehensif juga diidentifikasi sebagai langkah penting yang perlu diambil. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Temuan utama penelitian ini mengungkap bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih bervariasi secara signifikan. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tingkat transparansi yang cukup baik, di mana informasi keuangan disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Namun, di daerah lain, terdapat berbagai kendala yang menghambat penerapan transparansi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pentingnya transparansi, serta kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung akses informasi. Hambatan ini menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan kebijakan transparansi keuangan daerah, yang berdampak pada variabilitas tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah di masing-masing wilayah.

Persepsi masyarakat terhadap transparansi keuangan juga ditemukan bervariasi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya transparan dan mudah diakses. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Salah satu temuan yang tidak terduga adalah adanya persepsi bahwa meskipun informasi keuangan disediakan, kurangnya edukasi tentang bagaimana mengakses dan memahami informasi tersebut juga menjadi hambatan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya transparansi perlu didukung dengan program edukasi yang memadai untuk masyarakat agar mereka dapat lebih efektif dalam memanfaatkan informasi keuangan yang tersedia. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang fokus pada pentingnya transparansi dan cara-cara praktis untuk mencapainya. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya implementasi kebijakan transparansi yang lebih tegas dan komprehensif di tingkat pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan dukungan teknis yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat. Temuan lain yang menarik adalah adanya hubungan antara transparansi keuangan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi keuangan cenderung lebih aktif dalam proses pengawasan. Namun, di daerah dengan tingkat transparansi yang rendah, partisipasi masyarakat juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya penting untuk akuntabilitas, tetapi juga esensial untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa transparansi dan partisipasi publik saling berkaitan dan perlu diperhatikan secara bersamaan dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Temuan penelitian ini juga di dasarkan jumlah penduduk di kaitkan dengan pengelolaan dan alokasi sumber daya sebagai berikut:



Grafik 1. Pengelolaan dan Alokasi Sumber Daya

Grafik di atas menyajikan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bar chart yang berwarna biru muda menggambarkan jumlah penduduk, sementara line chart berwarna merah menunjukkan luas wilayah dalam kilometer persegi. Data ini menunjukkan variasi signifikan antara jumlah penduduk dan luas wilayah di berbagai kabupaten/kota. Temuan utama pertama adalah bahwa Kabupaten Konawe memiliki jumlah penduduk tertinggi, mencapai 266.299 orang, dengan luas wilayah yang juga cukup besar, yaitu 6.087,68 km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 38.849 orang, dengan luas wilayah 867,58 km<sup>2</sup>. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan luas wilayah di beberapa daerah, yang dapat mempengaruhi pengelolaan dan alokasi sumber daya.

Penelitian juga menemukan bahwa beberapa kabupaten/kota dengan luas wilayah yang relatif kecil memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Kota Kendari, misalnya, memiliki luas wilayah hanya 271,80 km<sup>2</sup>, namun jumlah penduduknya mencapai 347.381 orang. Hal ini menunjukkan bahwa urbanisasi dan konsentrasi penduduk di kota-kota besar memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini memperkuat pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk

memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Salah satu temuan unik adalah adanya beberapa daerah yang, meskipun luas wilayahnya besar, memiliki jumlah penduduk yang relatif rendah. Contohnya adalah Kabupaten Konawe Utara dengan luas 5.101,76 km<sup>2</sup> namun hanya memiliki 62.403 penduduk. Kemungkinan penjelasan untuk temuan ini adalah faktor geografis dan infrastruktur yang mungkin tidak mendukung distribusi penduduk yang merata. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, kualitas infrastruktur, dan kesempatan ekonomi dapat mempengaruhi distribusi penduduk ini.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan memahami variasi dan karakteristik unik setiap daerah, kebijakan yang lebih tepat sasaran dapat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih bervariasi secara signifikan antar kabupaten/kota. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk kapasitas sumber daya manusia, pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2017), yang juga menekankan bahwa penerapan prinsip transparansi yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kepercayaan publik. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menyoroti kendala spesifik yang dihadapi di Sulawesi Tenggara, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dalam konteks persepsi masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa aksesibilitas dan pemahaman terhadap informasi keuangan masih menjadi tantangan. Meskipun informasi keuangan disediakan oleh pemerintah daerah, kurangnya edukasi tentang cara mengakses dan memahami informasi tersebut menjadi hambatan utama. Hal ini sejalan dengan temuan Handayani dan Prasetyo (2018), yang menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa edukasi dan pelatihan tidak hanya penting untuk aparat pemerintah tetapi juga untuk masyarakat umum agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi keuangan daerah.

### **Transparansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Anggaran Di Sulawesi Tenggara**

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah hubungan antara transparansi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Daerah dengan tingkat transparansi yang tinggi menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Sebaliknya, di daerah dengan transparansi yang rendah, partisipasi masyarakat juga rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wicaksono (2020), yang menunjukkan bahwa peningkatan transparansi keuangan daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Penelitian ini memberikan bukti tambahan bahwa transparansi dan partisipasi publik saling berkaitan dan perlu diperhatikan secara bersamaan dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Perbandingan dengan Studi Lain, Penelitian ini mengkonfirmasi dan memperluas temuan dari literatur sebelumnya dengan fokus spesifik pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Misalnya, Suhartini (2017) menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan memberikan bukti empiris dari Sulawesi Tenggara,

menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan transparansi dengan baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Namun, penelitian ini juga menambahkan dimensi baru dengan mengidentifikasi kendala spesifik yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara.

Handayani dan Prasetyo (2018) menemukan bahwa kurangnya kapasitas sumber daya manusia adalah salah satu kendala utama dalam penerapan transparansi. Penelitian ini mendukung temuan tersebut dan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung aksesibilitas dan keterbukaan informasi keuangan. Ini menambah wawasan bahwa teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Temuan Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa transparansi keuangan berhubungan erat dengan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut dan menunjukkan bahwa di Sulawesi Tenggara, daerah dengan transparansi yang lebih tinggi memiliki partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Ini menegaskan bahwa transparansi tidak hanya penting untuk akuntabilitas tetapi juga esensial untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam tata kelola keuangan daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan daerah di Sulawesi Tenggara dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademis dengan menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk studi lebih lanjut dalam bidang akuntansi publik. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab pertanyaan utama yang diajukan dalam bagian Pendahuluan. Pertama, penelitian ini berhasil mengungkap bagaimana tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi masih bervariasi secara signifikan antara kabupaten/kota, dengan beberapa daerah menunjukkan penerapan yang cukup baik sementara yang lain menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana transparansi diterapkan di Sulawesi Tenggara dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapannya.

Selain itu, penelitian ini berhasil mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan transparansi keuangan. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi merupakan kendala utama. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap transparansi keuangan dan menunjukkan bahwa rendahnya transparansi berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor yang menghambat transparansi tetapi juga menunjukkan dampaknya terhadap kepercayaan publik, sesuai dengan tujuan penelitian yang diuraikan dalam Pendahuluan.

Hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang transparansi keuangan daerah dengan menunjukkan bahwa tingkat transparansi sangat bervariasi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menambahkan dimensi baru pada literatur yang ada dengan mengeksplorasi kendala spesifik yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan transparansi. Temuan ini menantang pemahaman saat ini yang cenderung menggeneralisasi penerapan transparansi tanpa mempertimbangkan variasi regional yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti bahwa pendekatan yang lebih kontekstual dan regional diperlukan untuk memahami dan meningkatkan transparansi keuangan daerah.

Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi adalah hambatan utama dalam penerapan transparansi. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Handayani dan Prasetyo (2018), namun memberikan kontribusi tambahan dengan fokus pada Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan bahwa solusi yang efektif untuk meningkatkan transparansi harus mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta investasi dalam infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini menantang pandangan yang mungkin terlalu sederhana tentang penerapan transparansi, dengan menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap transparansi keuangan dan aksesibilitas informasi masih menjadi isu utama. Hal ini memperluas pemahaman tentang pentingnya edukasi publik dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan menunjukkan bahwa edukasi dan pemahaman masyarakat adalah komponen penting dalam penerapan transparansi, penelitian ini menantang pandangan yang mungkin terlalu fokus pada kebijakan dan regulasi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan edukasional. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan erat antara transparansi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Temuan ini memperkuat penelitian Wicaksono (2020), tetapi juga menambah pemahaman dengan memberikan bukti empiris dari Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi informasi keuangan harus ditingkatkan. Ini menantang pemahaman yang mungkin memisahkan transparansi dari partisipasi publik, menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling terkait dan harus dikelola bersama. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan dalam data mungkin termasuk akses yang terbatas ke informasi keuangan yang sepenuhnya akurat dan terkini dari semua kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Selain itu, metodologi kualitatif yang digunakan, meskipun memberikan wawasan mendalam, mungkin memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan. Pendekatan deskriptif analitis yang digunakan dalam penelitian ini bergantung pada data yang tersedia dan persepsi responden, yang mungkin dipengaruhi oleh bias subjektif. Implikasi praktis dari temuan ini sangat signifikan. Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dapat menggunakan temuan ini untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan transparansi keuangan. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan, serta investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas. Selain itu, program edukasi publik yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dan cara mengakses informasi keuangan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif dalam mendorong transparansi keuangan daerah. Dengan memahami kendala spesifik yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual dapat dikembangkan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi bervariasi secara signifikan antara kabupaten/kota, dengan beberapa daerah menunjukkan penerapan yang baik sementara yang lain menghadapi berbagai kendala. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap transparansi keuangan masih rendah, yang berdampak negatif pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi memiliki partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Implikasi temuan ini terhadap teori dan praktik dalam bidang akuntansi publik sangat signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan daerah dan pentingnya konteks regional dalam penerapan transparansi. Temuan ini mendukung argumen bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi adalah kunci untuk meningkatkan transparansi. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk merancang program pelatihan dan investasi teknologi yang lebih efektif. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memberikan solusi konkret untuk meningkatkan transparansi tetapi juga memajukan pemahaman dalam bidang akuntansi publik dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dan kontekstual. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Keterbatasan dalam akses data dan penggunaan metodologi kualitatif mungkin mempengaruhi generalisasi temuan. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif yang lebih luas untuk menguji temuan ini di berbagai konteks regional lainnya. Selain itu, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran edukasi publik dalam meningkatkan transparansi keuangan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif. Query date: 2024-01-20 03:00:38. <https://osf.io/juwxn/download>
- Adila, R., Ulupui, I., & Utamingtyas, T. (2021). Implementasi SAK EMKM Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Studi Kasus UMKM MAWAR. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan ...*, Query date: 2024-03-02 10:59:49. <http://103.8.12.68/index.php/japa/article/view/348>
- Dianitha, K., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan makanan dan minuman di BEI. ... *Akuntansi: Transparansi Dan ...*, Query date: 2024-02-13 10:57:12. <https://ejurnal.undana.ac.id/JAK/article/view/2874>
- Hasibuan, A., Hardana, A., Hasibuan, L., & ... (2023). Penerapan akuntansi publik dalam pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki ...*, Query date: 2024-05-20 13:46:06. <http://repo.uinsyahada.ac.id/1246/>
- Handayani, D., & Prasetyo, B. (2018). Implementasi Transparansi Keuangan dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(2), 45-62.
- Suhartini. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 33-48.
- Wicaksono, A. (2020). Transparansi Keuangan dan Kepercayaan Publik: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(3), 98-113.